

BAB III

MONOGRAFI PENELITIAN

3.1 Profil Singkat Kota Padang

Kota Padang, yang kini berstatus sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, mulanya hanyalah sebuah kampung kecil di tepi Batang Arau bernama "*Kampung Batuang*" (Falah dkk,2000:6). Kawasan ini pada awalnya dihuni oleh nelayan, pembuat garam, dan peniaga yang berdatangan dari daerah pedalaman Ranah Minangkabau. Menurut catatan Mardanas Sofwan (1987:9), migrasi berlangsung sekitar abad ke-19, terutama dari Kubung XIII daerah Solok, sejalan dengan rute perdagangan emas yang sudah ada sejak tahun 1347 (Sofwan dkk,1987:9). Pemukiman pertama menempati gurun sebelah kiri Batang Arau, yaitu daerah sekitar Seberang Padang, yang kemudian diikuti oleh terbentuknya Gobah dan Kampung Dalam. Adanya mesjid pertama di Seberang Padang sebelum dipindahkan ke Ganting menguatkan bukti permukiman awal tersebut (Sofwan dkk,1987:12; Falah dkk,2000:6).

Pada akhir abad ke-16, di bawah pimpinan Sutan Sangguno Dirajo, Padang semakin ramai dan berkembang pesat dengan kedatangan pendatang dari nagari lain seperti Singkarak, Sanningbakar, dan Selayo. Untuk mengatur masyarakat, Sutan Sangguno Dirajo mengangkat delapan orang Penghulu dari berbagai suku. Nagari Padang kemudian dikenal secara tradisional sebagai "*Bandar Padang*" (Sofwan dkk,1987:12; Falah dkk,2000:6). Di samping didiami oleh penduduk menetap, Bandar Padang juga menjadi tempat singgah bagi "*urang dagang*" dari pedalaman maupun bandar di pesisir barat Sumatera, yang memiliki Surau dan Kuburan sendiri. Mobilitas ini meningkat seiring dengan permintaan rempah-rempah dan lada dari pedagang asing, menjadikan Padang dan pesisir barat Sumatera sebagai kawasan strategis perdagangan (Sofwan dkk,1987:13; Koestoro dkk,2007:29).

Kawasan pesisir barat Minangkabau mulai menarik perhatian bangsa Eropa, dan pada pertengahan abad ke-17, Kesultanan Aceh yang semula

berkuasa mulai melemah. Melalui Perjanjian Painan tahun 1662, Belanda (V.O.C) berhasil memperoleh izin berniaga, mendirikan loji, dan menyingkirkan pengaruh Aceh (Falah dkk,2000:9). Pada tahun 1666, V.O.C. menjadikan Padang sebagai pusat perwakilan dagang (*headquarter*) untuk wilayah pesisir barat Sumatera. Kebijakan ini memicu perlawanan rakyat pribumi dan orang Aceh yang memuncak pada 7 Agustus 1669, di mana benteng V.O.C. berhasil dibakar—peristiwa yang kini diperingati sebagai Hari Jadi Kota Padang (Falah dkk,2000:9-10). Meskipun demikian, V.O.C. tetap bercokol karena terikat oleh perjanjian politik, hingga akhirnya dibubarkan pada tahun 1798.

Dengan bubarnya V.O.C, wilayah kekuasaannya, termasuk Padang, diambil alih langsung oleh Pemerintah Belanda, dan pada tahun 1784 Padang ditetapkan sebagai pusat kedudukan sekaligus pusat perniagaan di wilayah Sumatera (Falah dkk,2000:11). Pasca Perang Paderi dan implementasi Traktat London, Padang menjadi pangkalan militer yang penting dan mengalami reorganisasi administrasi, ditetapkan sebagai ibukota *Zuidelijke Afdeeling* dan kemudian bagian dari *Afdeeling Padangsche Benedenlanden* (Koestoro dkk,2007:30). Perkembangan kota semakin pesat ketika Belanda mengeksploitasi batu bara di Ombilin-Sawahlunto; hal ini mendorong pembangunan infrastruktur vital seperti Pelabuhan Teluk Bayur (Emmahaven) pada tahun 1888 dan jalur kereta api, menjadikannya pusat kegiatan politik dan ekonomi terpenting di Sumatera (Koestoro dkk,2007:31).

Pada tahun 1906, Pemerintah Hindia Belanda secara resmi mendirikan administrasi kota yang dikenal sebagai Gemeente Padang, dan pada tahun 1920 Walikota (Burgemeester) pertama diangkat (Sofwan dkk,1987:15). Setelah masa perjuangan proklamasi, Mr. Abu Bakar Jaar diangkat sebagai Walikota Padang pertama pasca-kemerdekaan pada tahun 1946 (Sofwan dkk,1987:17). Setelah Perang Dunia kedua, Padang menjadi kancah pertempuran antara pasukan Inggris dan kelompok pemuda pejuang yang menginginkan kemerdekaan. Selama masa perjuangan revolusi, Bukittinggi

pernah menjadi ibukota Indonesia dan akhirnya pada tanggal 1 Januari 1950, Sumatera Barat menjadi provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka.

Sejak tahun 1957, Padang kembali menjadi pusat pemerintahan setingkat provinsi, dan akhirnya resmi ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979 (Koestoro dkk,2007:31). Bukti Padang sebagai pusat pemerintahan Sumatera Barat maka dibangunlah Kantor Gubernur di kota itu. Di samping itu, juga ditempatkan kantor penjabat setingkat Provinsi di Kota Padang (Asnan,2021:7). Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 maka resmilah Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat (Koestoro dkk,2007:31).

3.2 Geografis Kota Padang

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai luas wilayah 694,96 km² daratan yang terletak di pesisir pantai Barat Pulau Sumatera, atau setara dengan 1,65 persen dari luas provinsi Sumatera Barat (Yadi dan Yurni,2022:567;BPS Kota Padang,2025:5). Kota padang berada pada posisi astronomis antara 100°05'05"BT dan 100°34'09"BT dan 0°44'00"LS dan 1°08'35"LS (BPS Kota Padang,2024:3;Pemerintah Kota Padang,2024:4). Berdasarkan letak, Kota Padang berbatasan dengan 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) samudera, yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Gambar 3. 1 Peta Kota Padang



Sumber Gambar: id.wikipedia.org

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1980 dan Perda Nomor 10 Tahun 2005 wilayah administrasi Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Dari seluruh kecamatan tersebut terdapat 6 kecamatan dan 22 kelurahan yang berada di daerah pesisir. Kota Padang memiliki 19 pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan. Ada tiga pulau yang cukup besar, yakni Pulau Bintangor seluas 56,78 Ha, Pulau Sikuai seluas 48,12 Ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, serta Pulau Toran seluas 33,67 Ha di Kecamatan Padang Selatan (Koestoro dkk,2007:26;Pemerintah Kota Padang,2024:4).

Berdasarkan keadaan topografinya, beberapa sungai mengalir di wilayah kota Padang. Walaupun bukan sungai besar, pada kenyataannya muara sungai Batang Arau dapat digunakan sebagai tempat berlabuh perahu-perahu nelayan dan pedagang. Selanjutnya tempat itu tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi dan berkembang sebagai permukiman penduduk sekaligus pusat kekuatan, kekuasaan dan politik (Koestoro dkk,2007:26).

Adapun kondisi geologis kawasan ini kerap terjadi gempa yang melanda Pantai Barat Sumatera. Selain aktivitas vulkanik, gempa-gempa itu kebanyakan diakibatkan oleh adanya gerakan lempengan samudra yang menimbulkan patahan. Energi yang dihasilkan oleh patahan tersebut

memunculkan gempa tektonik yang kerap disusul gelombang pasang besar atau tsunami (Koestoro dkk,2007:26).

Hal ini menyebabkan pusat Pemerintahan Kota Padang yang pada awalnya berada di Kecamatan Padang Barat kemudian secara resmi berpindah ke Kecamatan Koto Tangah. Pemindahan ini dilakukan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal 18 April 2011. Lokasi ini termasuk dalam zona yang relatif aman terhadap resiko bencana tsunami dan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di kawasan pantai (Azzura,2023:38). Wilayah Kota Padang tergolong beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara berkisar antara 27,10°C hingga 28,70°C. Rata-rata tekanan udara di tahun 2023 berkisar antara 1.009,40 mb hingga 1.011,80 mb (BPS Kota Padang, 2024:5).

Dalam aspek kebudayaan, Kota Padang dipengaruhi oleh budaya Minangkabau. Pengaruh budaya Minangkabau inilah yang mempengaruhi perekonomian masyarakat Kota Padang yaitu budaya dagang. Minangkabau sejak dulu dikenal sebagai kota perdagangan yang berpusat di sekitar pantai barat dan timurnya. Sejak abad ke-14 daerah pesisir memiliki peran penting sebagai sentra perdagangan. Salah satu pelabuhan tersebut berada di Kota Padang yaitu pelabuhan *Emmahaven* yang kini disebut pelabuhan Teluk Bayur dan pelabuhan Muaro Padang. Pelabuhan inilah yang menjadi tempat berlabuh kapal dari daerah sebelum sampai ke pulau Jawa (Wahyuni, 2023:40).

Berdagang bagi masyarakat Minangkabau telah menjadi suatu ciri khas. Profesi pedagang ini telah melekat pada masyarakat Minangkabau dan merupakan legitimasi atau pandangan yang telah diberikan oleh masyarakat luas kepada mereka. Sehingga mereka sering disebut saudagar Minang dikarenakan kepiawaiannya dalam mengembangkan sistem ekonomi (Iswadi & Zainal,2021:101-103). Disebabkan hal inilah masyarakat Kota Padang yang dipengaruhi budaya Minangkabau selalu melakukan inovasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebiasaan inilah yang menjadikan

rakyat dengan pendapatan minimum membentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha ini dapat berupa membuka toko kelontong, pedagang kaki lima, usaha kuliner rumahan, bahkan menjual barang secara grosir dan eceran. Usaha yang dibuat oleh pedagang eceran ini kemudian merambah pada kegiatan penyaluran BBM secara eceran seperti membuka kios Pertamina.

3.3 Pertamina

Pertamina merupakan sebuah label yang dipakai oleh pedagang eceran BBM menggunakan alat berbentuk pompa manual maupun otomatis dengan takaran yang hampir mirip dengan pompa yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selain itu, Pertamina juga menggunakan label nama yang mirip dengan nama Pertamina (Saifunuha,2022:32). Pertamina telah ada sekitar tahun 2012 an mulai marak sekitar tahun 2014.

Kios Pertamina menjadi alternatif tempat pengisian BBM, khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan BBM dilokasi yang jauh dari SPBU. Disisi lain Pertamina memberikan lapangan pekerjaan bagi pemilik kios dan dapat menambah penghasilan yang tentunya menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Berdasarkan hal tersebut, Pertamina merupakan inovasi baru yang menguntungkan satu sama lain, baik dari penjual maupun pembeli (Ajis,2020:59). Selain menjual BBM bersubsidi jenis *Pertalite*, Pertamina juga mulai menjual BBM non subsidi jenis *Pertamax* (Suyanto,2020:8). Pertamina ini disalurkan menggunakan alat yang memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang ditanam dibawah dinding beton. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan *nozzle* sebagaimana SPBU Pertamina pada umumnya (Hayani, 2018:48).

Adapun jenis Pertamina digital ini memiliki dua model, yaitu sebagai berikut:

a. Pertamina Model *Portabel*

Mesin yang digunakan untuk penampungan BBMnya berada di dalam *casing* mesin dan mesin Pertamina model ini memakai roda agar mudah dipindah-pindah tempatnya. Mesin Pertamina jenis ini biasanya digunakan oleh para pelaku usaha yang tidak memiliki lahan yang luas untuk membuka usaha ini (Lestari,2019:36).

b. Pertamina Model *External* (Tanam)

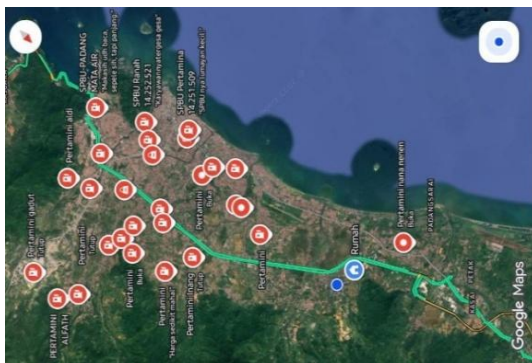
Mesin yang digunakan untuk penampungan BBMnya berada di luar *casing* mesin dan mesin penampungan ini kebanyakan ditanam dan tempatnya tidak terlalu dekat dengan *casing* mesin (Lestari,2019:36).

Secara operasional, Pertamina dioperasikan secara mandiri oleh pedagang BBM eceran yang tidak memiliki izin usaha resmi dari pemerintah maupun badan pengatur energi (Pratama dkk,2025:1081). Hal tersebut menjadikan usaha ini dikategorikan ilegal. selain melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, usaha ini juga telah melanggar beberapa peraturan pelaksana UU tersebut. Salah satu diantaranya yaitu, Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM. Di sisi lain untuk masuk kategori sub penyalur sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 13 Permen ESDM ini wilayah tersebut harus daerah terluar, terdepan, dan terpencil (3T) sehingga sulit mendapatkan akses BBM. Namun wilayah yang menjadi objek penelitian penulis yakni Kota Padang bukanlah kategori 3T yang dimaksud.

Selain faktor operasional, keberadaan Pertamina juga berdampak pada harga jual BBM. Dimana Pertamina menjual BBM dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang ditetapkan oleh badan usaha niaga. Hal ini juga berdampak pada keuntungan yang didapatkan oleh pihak SPBU berkurang dan terjadi kelangkaan BBM di SPBU akibat tindakan pembelian BBM yang melebihi ketentuan oleh pelaku, serta terjadinya dugaan penimbunan BBM.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan Kota Padang merupakan pusat perindustrian dan perdagangan utama sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, salah satu syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh pemilik usaha Pertamina sebagai sub penyalur adalah jarak antara SPBU dengan lokasi usaha minimal berjarak 10 KM (BPH Migas,2020). Dari observasi itu, penulis menemukan bahwa perbandingan keberadaan SPBU dengan Pertamina dalam satu wilayah yaitu 1:10. Hal tersebut dapat dalam gambar berikut:

Gambar 3. 2 Pertamina di Kota Padang



Sumber Gambar :Google Maps

Gambar 3. 3 SPBU di Kota Padang



Sumber Gambar: Google Maps

Berdasarkan 2 gambar diatas, dapat diketahui bahwa keberadaan Pertamina mendominasi di Kota Padang. Keberadaan Pertamina ini belum secara keseluruhan terdaftar di google maps, diluar itu masih banyak titik koordinat yang menunjukkan dominasi Pertamina di Kota Padang. Di daerah seperti Lubuk Minturun hingga ke Sungai Bangek terdapat sekitar 10 Pertamina digital yang belum terdata di google maps.